

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan sistem zonasi sekolah terhadap ekualitas (pemerataan kesempatan) dan kualitas pendidikan serta mengevaluasi apakah kebijakan sistem zonasi sekolah telah memenuhi target reformasi kebijakannya yaitu pemerataan distribusi layanan dan akses pendidikan. Lokasi penelitian adalah di SMAN 5 dan SMAN 14 Surabaya. Indikator yang digunakan untuk mengukur ekualitas adalah kombinasi indikator ekualitas pendidikan dari Smith, Lusthaus, Drudy, dan Pfeffer yang terdiri dari tujuh dimensi yaitu kemampuan akademis, minat dan bidang ketertarikan, status sosial ekonomi keluarga, keberagaman suku, keberagaman agama, latar belakang pendidikan sebelumnya, serta latar belakang pendidikan orang tua anak. Sementara aspek yang digunakan untuk menganalisis kualitas adalah enam dimensi kualitas pendidikan dari Adams dan Jansen yaitu kualitas sebagai reputasi, kualitas sebagai *input* sumber daya, kualitas sebagai proses, kualitas sebagai konten, kualitas sebagai *output*, serta kualitas sebagai nilai tambahan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *convergent parallel mixed methods* dengan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menganalisis aspek ekualitas dan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis aspek kualitas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah survei dengan menyebarkan kuesioner *online* kepada siswa dan wawancara mendalam kepada guru, kepala sekolah, dan staf Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Responden ditentukan dengan teknik *convenience sampling* sementara informan ditentukan dengan cara *purposive*.

Hasil analisis penelitian untuk aspek ekualitas menunjukkan bahwa setelah kebijakan sistem zonasi diberlakukan, pemerataan kesempatan (ekualitas) pendidikan menjadi lebih merata. Anak dengan berbagai latar belakang dan karakteristik dapat masuk ke SMA negeri selama kriteria domisilinya memenuhi jarak untuk persyaratan kebijakan sistem zonasi. Sementara hasil analisis penelitian untuk aspek kualitas menunjukkan bahwa setelah kebijakan sistem zonasi diberlakukan, kualitas pendidikan tidak serta-merta menjadi lebih merata. Faktor-faktor yang memengaruhi hal tersebut di antaranya sistem pembelajaran yang digunakan sekolah dan karakteristik sekolah itu sendiri.

Hasil analisis lebih lanjut untuk mengevaluasi pencapaian target pemerataan distribusi akses dan layanan pendidikan setelah kebijakan sistem zonasi diberlakukan menunjukkan bahwa pemerataan distribusi akses pendidikan sudah berhasil dipenuhi, tetapi pemerataan distribusi layanan pendidikan belum. Pemerataan distribusi akses pendidikan dapat dikatakan sudah berhasil dipenuhi karena pemerataan kesempatan (ekualitas) juga sudah tercapai. Sebaliknya, pemerataan distribusi layanan pendidikan belum berhasil dipenuhi karena tiga hal, yaitu kurangnya jumlah SMA negeri, persebaran SMA negeri yang belum merata, serta masih adanya kesenjangan sarana prasarana dan fasilitas antara SMA negeri unggulan/favorit dengan SMA negeri bukan unggulan/favorit.

**Kata kunci:** ekualitas pendidikan, kualitas pendidikan, reformasi kebijakan pendidikan, kebijakan sistem zonasi sekolah

## ABSTRACT

The purpose of this research is to evaluate the impact of the school zoning system policy on equality (equal opportunity) and quality of education, as well as to evaluate whether the school zoning system policy has met its policy reform targets, that is equal distribution for access to education and educational services. This research is located at State Senior High School (SSHS) 5 and SSHS 14 Surabaya. The indicator used to measure equality is a combination of educational equality indicators from Smith, Lusthaus, Drudy, and Pfeffer which consist of seven dimensions, namely academic ability, areas of interest, family's socioeconomic status, ethnic diversity, religious diversity, children's previous educational background, and educational background of the children's parents. The aspects used to analyze quality of education are the six dimensions of educational quality from Adams and Jansen, namely quality as reputation, quality as resources and input, quality as process, quality as content, quality as output, and quality as value added.

The method used in this research is convergent parallel mixed methods with quantitative descriptive approach to analyze aspects of equality and qualitative descriptive approach to analyze aspects of quality. The data were collected by conducting a survey by distributing online questionnaires to students, as well as doing in-depth interviews with teachers, principals, and staff of East Java Provincial Education Office. Respondents were determined by convenience sampling technique, while informants were determined by purposive method.

The results of analysis for the aspect of equality show that after the school zoning system policy was implemented, equality of education became more even. Children from various backgrounds and characteristics can be accepted as students at state senior high schools as long as their residences meet the distance criteria for the school zoning system policy requirements. Meanwhile, the results of analysis on the quality aspect show that after the school zoning system policy was implemented, the quality of education did not instantaneously become more equal. The factors influencing this condition are the learning system used by the school and the characteristics of the school itself.

The results of further analysis to evaluate the target achievement of equal distribution for access and education services after the zoning system policy was implemented show that the equal distribution for access to education has been met, but the distribution for educational services has not been equal. Equal distribution for access to education have been successfully fulfilled because equal opportunity (equality) has also been achieved. On the other hand, the equal distribution for educational services has not been fulfilled due to three reasons, namely the insufficient number of state senior high schools existed, the unequal distribution of the existing state senior high schools, and the disparity of facilities between "excellent/favorite" state senior high schools and "non-excellent/non-favorite" state senior high schools.

**Keyword: equality of education, quality of education, education policy reform, school zoning system policy**